

DUGAAN INTIMIDASI WALI MURID

Pengadaan Seragam Jadi Pemicu

KULONPROGO (KR) - Tindakan intimidasi dan penyekapan yang diduga dilakukan oknum Satpol PP Kulonprogo, AR terhadap salah satu wali murid SMA Negeri 1 Wates, Agung Purnomo, ternyata dipicu proses pengadaan seragam bagi siswa kelas X sekolah tersebut. Agung yang juga pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang setempat, kemudian meminta perlindungan LBH Yogya dan melapor ke Polda DIY.

Menanggapi tuduhan harga seragam yang tidak sesuai kualitas, Pengurus Paguyuban orangtua (POT) siswa yang mengkoordinir pengadaan seragam, Nurhadiyanto menegaskan, proses pemesanan seragam sudah melalui kesepakatan. POT juga telah berkomunikasi dengan seluruh orangtua siswa dan pihak sekolah.

Selain itu, pihaknya, mempertimbangkan reputasi dan melihat spesifikasi barang yang ditunjukkan pihak toko yang biasa melayani pengadaan seragam SMAN 1 Wates. "Setelah kami melihat barang dan mengetahui harganya lalu kami sampaikan ke orangtua siswa. Siapa yang mau ikut membeli dipersilakan mengisi blanko. Dari 252 anak, yang ikut pembelian bersama POT 240 orang. Kita pesankan barangnya di toko tersebut," kata Nurhadiyanto saat klarifikasi di Omah Beji Wates, Selasa (4/10).

Klarifikasi ini dihadiri Ketua Komite SMAN 1 Wates, Sarji SIP, Kepala SMAN 1 Wates Aris Suwasana dan oknum anggota Satpol PP, AR. "Seluruh proses pengiriman, peneri-

maan dan pendistribusian seragam kepada siswa berjalan baik," jelasnya.

Namun, pada 19 Agustus muncul komplain lantaran celana salah satu siswa terkena knalpot, sehingga ada dugaan bahannya mudah rusak. Pada 20 Agustus, orangtua siswa tersebut diantar ke toko untuk minta penjelasan. Pihak toko mengatakan, memberikan garansi. Bahkan, jika warnanya memudar boleh ditukarkan. Termasuk jika ada yang kecewa uang dan barang bisa kembali.

Pada 23 September, Ketua POT mendatangi lima orangtua yang kecewa dan bersikeras tidak terima. "Seorang wali siswa mengaku penyidik (PPNS) mengatakan punya bukti dan menuduh POT merancang ingin menikmati selisih harga. Solusi tak bisa dicapai dan yang bersangkutan justru menyodorkan pilihan kepada POT ikut melapor atau dilaporkan," tuturnya.

Kepala SMAN 1 Wates, Aris Suwasana mengatakan, pengadaan seragam menjadi kewenangan POT dan seragam menjadi hak orangtua. Sementara itu, oknum Satpol PP, AR

membantah tuduhan tindakan intimidasi dan penyekapan. Pertemuan di ruang Kasat Pol PP, Drs Sumiran sesungguhnya upaya mediasi agar sesama POT menciptakan kondusifitas proses belajar mengajar dan anak didik tidak terganggu serta menjaga nama baik SMAN 1 Wates. Ketua Komite Sarji SIP mendorong masalah tersebut bisa diselesaikan secara damai.

Sekda DIY, K Baskara Aji meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak berkepanjangan. "Kalau soal pelaporan ke Polda DIY sudah masuk ranah hukum, nanti yang menindaklanjuti adalah pihak kepolisian. Meski begitu saya berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak berkepanjangan lagi," kata Sekda DIY.

Menurut Baskara Aji, soal seragam menjadi pemicu munculnya persoalan tersebut. Pemda DIY telah meminta Disdikpora untuk menyelesaikan persoalan itu secara baik antara sekolah dan orangtua. Prinsipnya soal seragam sifatnya tidak boleh memaksa.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda DIY, Sabtu (1/10). Polda DIY sudah menindaklanjuti, bahkan penyidik telah memeriksa saksi pelapor. Ia memastikan, dalam waktu dekat pihak yang disebutkan dalam Laporan Polisi (LP) akan diperiksa. **(Rul/Ria/Ayu)-f**

PELANTIKAN GUBERNUR-WAGUB DIY

Sederhana, Tak Ada Open House

YOGYA (KR) - Berbagai persiapan menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 yang akan dilakukan di Jakarta pada 10 Oktober mendatang, terus dilakukan Pemda DIY untuk memastikan pelantikan berjalan dengan baik dan lancar.

Seremoni pelantikan

akan dikemas secara sederhana. Bahkan Pemda DIY memastikan tidak akan menggelar open house untuk *mangayubagya* pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027.

"Pemda DIY tidak akan

mengadakan open house, jadi aktivitas pemerintahan tetap jalan. Ini kan aktivitas rutin setiap 5 tahun, tidak perlu perayaan khusus. Kita syukur saja tapi tidak perlu ada pesta atau sesuatu yang perlu kita besar-besarkan," kata Sekda DIY K Baskara Aji di kantornya, Selasa (4/10).

Menurut Baskara Aji, perayaan pelantikan Gubernur dan Wagub DIY yang dikemas secara sederhana itu merupakan *dhawuh* atau perintah langsung Sri Sultan HB X.

Raja Kraton Yogyakarta itu menginginkan agar prosesi pelantikan Gubernur dan Wagub DIY tidak dirayakan dengan

BOYONGAN DARI AMBARKETAWANG KE KRATON YOGYA Membangun Sebuah Peradaban Baru

PERISTIWA pindah atau boyongan Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarga, dan seluruh pasukannya dari Pesanggrahan Ambarketawang ke Kraton Yogyakarta pada 7 Oktober 1756, penting diperingati karena merupakan simbol yang penuh dengan makna yang berkaitan dengan kehidupan di Yogyakarta sampai saat ini.

Sejarawan UGM, Bahauddin MHum menilai, boyongan ini dapat dilihat sebagai dimulainya pembangunan peradaban baru berbasis kemanusiaan yang kemudian menjadi identitas khas Kota Yogyakarta oleh Sultan HB I.

"Sultan HB I pada saat itu memandang bahwa tidak ada harapan lagi untuk membangun kembali peradaban Mataram Islam, karena kondisinya yang sudah menurun dari berbagai aspek. Oleh karena itu, membangun sebuah peradaban baru dengan mendirikan Kasultanan Yogyakarta merupakan pilihan tepat," katanya.

Secara fisik, lanjut Bahauddin, Kota Yogyakarta penuh dengan filosofi yang menggambarkan cita-cita kehidupan manusia yang lebih baik, secara horizontal maupun transendental. Secara sosial, Sultan HB I telah meletakkan dasar pengembangan peradaban Yogyakarta yang berlandaskan aspek kemanusiaan dan harmoni dalam bingkai kebhinekaan. "Inilah dasar peradaban khas Yogyakarta yang dasarnya telah diletakkan dengan sangat kokoh oleh Sultan HB I dan kemudian menjadikan Yogyakarta sebagai pusat peradaban Jawa, bahkan Indonesia pada saat ini," katanya.

Bahauddin menjelaskan, setelah Perjanjian Giyanti, 15 Februari 1755, dengan difasilitasi oleh VOC, Sultan HB I dan PB III bertemu di Lebak, Jatisari untuk melakukan rekonsiliasi dan kesepakatan pe-



KR-Devid Permana

Bahauddin MHum

milihan identitas budaya masing-masing. Kemudian pada 15 Maret 1755, Sultan HB I memproklamasikan berdirinya Kasultanan Yogyakarta (Hadeging Nagari Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat).

Pada kesempatan yang sama Sultan HB I mengumumkan secara resmi bahwa daerah kekuasaannya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di hutan Beringin. Sultan HB I segera memerintahkan rakyat untuk membat hutan Beringin untuk didirikan kraton yang dimulai pada Kamis Pon, 13 Suro Tahun Wawu 1681 atau 9 Oktober 1755.

Selama kraton itu dibangun, Sultan HB I menempati Pasanggrahan Ambarketawang di Gamping. "Dari tempat inilah Sultan HB I selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan," katanya.

Setelah setahun proses pembangunan dilakukan, pada Kamis Pahing, 13 Suro 1682 atau 7 Oktober 1756, Sultan HB I dan keluarganya boyongan dari Pesanggrahan Ambarketawang masuk ke Kraton Yogyakarta melalui Regol Kemagangan. Peristiwa boyongan ini dimonumenkan dalam bentuk sengkalan *memet dua naga yang ekornya saling mengait*. Sengkalan itu berbunyi 'Dwi Naga Rasa Tunggal' yang berarti 1682 tahun Jawa.

"Sengkalan itu berarti menyatunya dua rasa menjadi satu," katanya.

Menurut Bahauddin, Sultan HB I merupakan sosok pemimpin yang cerdas, berani, religius, bijaksana dan humanis. Aspek-aspek itu tergambar jelas pada gelar yang disandanginya dan sampai saat ini masih digunakan oleh Sultan penerusnya. Perjuangannya dalam melawan VOC pada pertengahan abad ke-18 mencerminkan bahwa Sultan HB I mempunyai jiwa nasionalisme dan spirit yang tinggi dalam menjaga persatuan dan kesatuan, melestarikan warisan budaya yang adiluhung, serta tidak rela tanah Jawa diacak-acak oleh Belanda.

Memperingati 266 tahun boyongan Sri Sultan HB I dari Pesanggrahan Ambarketawang ke Kraton Yogyakarta, Paniradya Kaistimewaan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY menggelar acara di Pendapa Agung nDalem Mangkubumen Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Jumat (7/10) pukul 13.00-15.30, dan disiarkan *live streaming* di channel YouTube Paniradya Kaistimewaan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewaan>.

Acara tersebut diisi Dialog Keistimewaan tentang Boyongan Sri Sultan HB I dari Pesanggrahan Ambarketawang ke Kraton Yogyakarta menampilkan narasumber Andriana Wulandari SE (Anggota Komisi D DPRD DIY), Bahauddin MHum (Sejarawan UGM), Ariyanti Luhur Trisetyarini SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewaan DIY) dengan moderator Widihasto Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan DIY).

Acara tersebut dimeriahkan Pentas Tari Ayodya oleh Sanggar Glirjo, dan Pentas Musik Summer Leaves Acoustic serta Pemutaran Video Dokumenter 'Boyongan'. **(Dev)**

euforia secara berlebihan. Jadi berbeda dengan saat pelantikan pada tahun 2017 lalu. Dimana pada waktu itu Pemda DIY mengadakan acara open house dan Kenduri Ageng di Bangsal Kepatihan yang terbuka untuk ma-

syarakat umum. "*Ngarsa Dalem dhawuh*, kita diminta tidak usah euforia untuk hal-hal seperti itu, jadi sederhana saja seperti sehari-hari saja. Untuk itu seandainya ada masyarakat yang mau merayakan

pelantikan kembali Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diperbolehkan. Tapi diimbau kegiatan itu diselenggarakan secara sederhana saja tidak perlu bermewah-mewah," ungkap Baskara Aji. **(Ria)-d**

KEMENTERIAN PPPA-MAHKAMAH AGUNG

Lindungi Perempuan dan Anak dalam Perceraian

JAKARTA (KR) - Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Dr Aco Nur SH MH terkait perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin dan perceraian.

Pribudiarta menyatakan, pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sangat penting bagi Kementerian PPPA yang mempunyai mandat perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak terkait dispensasi kawin maupun pascaperceraian saat ini masih menjadi isu nasional yang

perlu mendapatkan perhatian dan sinergi multisektor.

"Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Mahkamah Agung atas terselenggaranya perjanjian kerja sama ini. Pertemuan ini menjadi sangat strategis sebagai wujud komitmen dan kehadiran negara untuk menghentikan praktik perkawinan anak, serta memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak pascaperceraian," ujar Pribudiarta dalam penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama antara Ditjen Badilag MA dengan Kementerian PPPA, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Jakarta, Selasa (4/10). **(Ati)-f**

PLAZA MALIOBORO

Hadirkan Program Belanja Tenant



KR-Tomi Sujatmiko

Surya Ananta (kanan) berfoto usai media gathering.

YOGYA (KR) - PT Setia Mataram Tritunggal (SMT) sebagai pengelola Plaza Malioboro Yogyakarta menghadirkan berbagai program belanja dari tenant dan pameran usaha kecil menengah (UKM) guna menambah *experience* bagi pengunjung. Selanjutnya tetap menggandeng UKM sebagai partner berkesinambungan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di Yogyakarta.

Juru Bicara Plaza Malioboro Yogyakarta Surya Ananta menjelaskan, pihaknya mengadakan pameran di Atrium bertajuk Sekati Ing Mall pada 5-10 Oktober 2022 yang menyajikan produk unggulan pelaku UKM seperti kerajinan, fashion dan berbagai kuliner khas Yogyakarta oleh Dinas

Perindustrian, Koperasi dan UKM Yogyakarta. Selain itu ada Jogja PDN Expo Malioboro pada 13-16 Oktober 2022.

Event ini diselenggarakan Perdagangan Dalam Negeri, Pariwisata dan Investasi Daerah menampilkan berbagai produk unggulan daerah seperti fashion craft, culinary, pesta budaya Nusantara dan city tour. Termasuk peluang investasi daerah.

"Kami juga ada berbagai program tenant seperti di Matahari Departement Store, The Body Shop hingga McDonald Big Mac Beef Rasher seharga Rp 74.500. Ke depan semua program di Plaza Malioboro sejalan dengan upaya Pemda DIY untuk menata ulang wajah Malioboro," kata Surya

Ananta.

Surya Ananta yang juga General Manager Plaza Ambarrukmo menjelaskan, Plaza Malioboro dan satu hotel telah dikelola pihaknya sejak 13 September 2022 karena berakhirnya masa kontrak selama 30 tahun pada 12 September 2022. Kedua aset itu akhirnya disewakan oleh Pemda DIY kepada PT SMT dan penandatanganan kontrak telah dilakukan di Kepatihan Yogyakarta.

Namun, kata Surya Ananta, pihaknya bersama tenant terus mencari konsep tepat dalam pengembangan Plaza Malioboro satu tahun mendatang. Termasuk memberikan benefit bagi para UKM yang akan mengikuti berbagai pameran sehingga kehadiran Plaza Malioboro memberi dampak positif bagi semua pihak.

"Masalah tenant akan didiskusikan kembali. Namun, yang sudah baik dan berjalan selama ini tinggal melanjutkan saja. Kami juga akan bersinergi dengan banyak pihak, termasuk mengetahui keinginan wisatawan mancanegara dan lokal sehingga dampak positif dari hadirnya Plaza Malioboro bisa dirasakan semua pihak," imbuhnya. **(Tom)-d**

BANK BPD DIY

Dirgahayu

Tentara Nasional Indonesia

5 Oktober 1945 - 5 Oktober 2022

Bank BPD DIY Call 1500061